



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2011 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2011, yang merupakan pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana APBD Tahun 2011;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dimaksud huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2011, dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Juli 2010

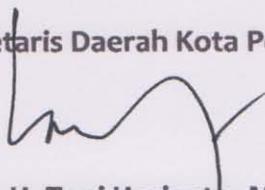
WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Juli 2010

Sekretaris Daerah Kota Pontianak



Ir. H. Toni Herianto, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 30 TAHUN 2010

TANGGAL 23 Juli 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Walikota Pontianak Tahun 2008-2013, oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2011 merupakan penjabaran dari skema RPJM Kota Pontianak 2010-2014. Penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak.
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014.
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2011 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2011, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2010-2014
- 2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan
- 2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan
 - 2.3.1 Permasalahan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 2.3.2 Permasalahan dalam Pengembangan Perekonomian Daerah
 - 2.3.3 Permasalahan dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan
 - 2.3.4 Permasalahan dalam Pelayanan Publik, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum dan Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ✓

- 3.1 Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2008-2009
- 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2011 dan 2012
- 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi
- 3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan
 - 3.4.1 Dana Desentralisasi/APBD
 - 3.4.2 Dana Dekonsentrasi/APBN
 - 3.4.3 Dana Tugas Pembantuan/APBN
- 3.5 Arah Kebijakan Keuangan
 - 3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan
 - 3.5.2 Arah Kebijakan Belanja
 - 3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN ✓

- 4.1 Agenda Pembangunan
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

BAB V KAJIAN PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2010-2014 yang telah disusun secara komprehensif, terencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah yang dimiliki perlu ditindaklanjuti dengan dokumen perencanaan tahunan. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan setiap tahunnya diperlukan perencanaan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak.

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 sebagai dasar pijakan utama substansi RKPD 2010 ini yang kemudian dilengkapi dengan review Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan.

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2010-2014

2.1.1. Visi Kota Pontianak 2010-2014

Visi Kota Pontianak tahun 2010-2014 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda RPJM adalah: ***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik”***.

Visi tersebut secara intrinsik memuat makna-makna sebagai berikut:

Kata ***“Kota Khatulistiwa”*** menunjukkan bahwa visi tersebut mengacu kepada potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang strategis. Kota Pontianak menjadi pintu gerbang utama akses menuju Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan salah satu kota yang dapat diakses dari dan ke negara tetangga Malaysia melalui darat. Kota Pontianak juga berfungsi sebagai kota transit dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani distribusi barang dan manusia untuk di skala lokal, regional dan internasional.

Berwawasan Lingkungan mempunyai pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam akan dilakukan secara *sustainable* dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidak melebihi batas ambang baku mutu lingkungan. Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota dengan mengedepankan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pontianak Sehat.

Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia mencitrakan komitmen untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui berbagai kebijakan dan program peningkatan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan. Fokus peningkatan diarahkan khususnya dalam peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan kualitas tenaga kerja. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita dengan berlandaskan pada strategi keberpihakan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Terdepan dalam Peningkatan Pelayanan Publik mempunyai pengertian bahwa berbagai kebijakan dan program peningkatan pelayanan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. Fokus kebijakan peningkatan layanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan, pelayanan administrasi kependudukan dan penyediaan prasarana dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Upaya yang dilakukan ini adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat akan layanan publik.

2.1.2. Misi Kota Pontianak 2010-2014

Misi Kota Pontianak secara substansial memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tujuh misi yang merupakan agenda pokok pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan (2010-2014) adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya, dan harmonis**
2. **Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda**
3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran**
4. **Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif**
5. **Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa**
6. **Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan**
7. **Meningkatkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Ketaatan Hukum dan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Kedudukan program dan kegiatan dalam RKPD 2011 ini adalah sebagai peletak pondasi, langkah awal yang kokoh dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam RPJM. Program dan kegiatan RKPD 2011 diarahkan untuk mencapai target indikator keberhasilan tahun kedua RPJM sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPd 2011

No.	INDIKATOR	TAHUN 2011
I. UMUM		
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73.51
	- Angka Melek Huruf (%)	97.37
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	71.24
	- Pengeluaran Riil per kapita (Rp000/bln)	654.64
	- Lama sekolah (tahun)	10.57
II. BIDANG EKONOMI		
1	Angka Kemiskinan (%)	5.77
2	Angka Pengangguran Terbuka (%)	6.90
3	Angka Kesempatan Kerja (%)	90.78
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.32%
5	Inflasi (%)	7.27%
6	PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta)	7,084,069.32
7	PDRB per kapita konstan (Rp.)	12,599,386.26
III. BIDANG KESEHATAN		
1	Angka Kematian Bayi	3.32%
2	Angka Kematian Balita (kasus)	0
3	Gizi Buruk (kasus)	0
4	Kejadian Luar Biasa (DBD) (angka kesakitan per 100.000 PDDK)	20.46%
IV. BIDANG PENDIDIKAN		
1	APM SD (%)	100.00
	APM SLTP (%)	100.00
	APM SLTA (%)	80.00
3	Angka Putus Sekolah SD	0.00
	Angka Putus Sekolah SLTP	0.00
	Angka Putus Sekolah SLTA	0.55
6	NEM rata-rata SD/MI	7.27
7	NEM rata-rata SLTP/MTs	6.46
8	NEM rata-rata SMU/MA	6.45
V. BIDANG INFRASTRUKTUR		
1	Tingkat Pelayanan Air Bersih (penduduk)	80.50%
2	Jumlah Sambungan PDAM	77,927.00
No.	INDIKATOR	TAHUN 2011
3	Kondisi Jalan Kota Mantap/Baik	66.38%
4	Pelayanan Kebersihan (Sampah Terangkut)	83.50%
5	Jumlah Rumah Kumuh (% Penanganan)	15.00%
VI. BIDANG PELAYANAN PUBLIK		
1	Pelayanan Perijinan (% pelayanan sesuai SPM)	82.50%

Sumber: RPJM Kota Pontianak tahun 2010-2014

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam menyusun RKPd tahun 2011 perlu memperhatikan hasil pembangunan yang telah dicapai serta permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan tahun sebelumnya menjadi dasar masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat.

Selain hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya juga perlu diperhatikan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik wilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan kota serta perkembangan ekonomi (krisis global) yang berdampak baik pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota merupakan hal-hal yang tidak terelakkan dan harus menjadi pertimbangan penting di dalam mendesain perencanaan pembangunan satu tahun kedepan. Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah isu-isu sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban yang semuanya juga merupakan informasi krusial/penting dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan yang tidak lain adalah RKPD.

Berikut ini disampaikan evaluasi kinerja Pembangunan Kota Pontianak sampai dengan periode tahun 2009-2010.

Kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk citra pembangunan pada umumnya di Kalimantan Barat. Kota Pontianak yang terletak di delta Sungai Kapuas secara fisik terbelah oleh Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil menjadi tiga bagian wilayah. Topografi yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0,5 m-1,5 m sangat rentan terhadap pengaruh pasang naik dan pasang surut air laut. Sebagian besar wilayah kota tertutup tanah gambut dengan kedalaman berkisar antara 1 m-4 m, sehingga daya dukung tanahnya sangat rendah dan rentan terhadap erosi. Curah hujan yang cukup tinggi berkisar 1500 mm-3000 mm per tahun, menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Pontianak tergenang. Hal ini terjadi pada saat pasang naik air laut pada posisi maksimal dan terjadi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga kawasan-kawasan tertentu mengalami genangan yang cukup tinggi yang berdampak pada meningkatnya kerusakan pada beberapa ruas jalan. Pada saat musim penghujan, wilayah Kota Pontianak yang tergenang dapat mencapai 4.961 Ha atau 46%. Luas wilayah yang tergenang di Kecamatan Pontianak Selatan mencapai 34,5%, Pontianak Barat 96,0%, Pontianak Kota 64,4%, Pontianak Timur mencapai 36,3% dan Pontianak Utara mencapai 26,1% dari luas wilayahnya.

Sementara pada musim kemarau, masyarakat mengalami kekurangan air bersih akibat sumber air baku terintrusi air laut, sehingga kapasitas produksi air bersih terganggu yang berdampak pada menurunnya *supply* air bersih kepada masyarakat. Meningkatnya luas kawasan yang tergenang dan semakin tingginya frekuensi terjadinya genangan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan Kota Pontianak. Apabila dilihat kembali pada 10-20 tahun yang lalu, luas kawasan yang tergenang dan frekuensi genangan jauh lebih kecil di banding saat ini. Kondisi ini terjadi sebagai dampak pembangunan yang dilaksanakan selama ini baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam pembangunan infrastruktur kota dapat dilihat dari meningkatnya cakupan pelayanan air bersih yang dirasakan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2006 jumlah sambungan air bersih sebanyak 63.607 sambungan meningkat menjadi 65.972 sambungan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 total jumlah sambungan air bersih meningkat menjadi 68.627 sambungan yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2009 menjadi 71.327 sambungan. Dari jumlah tersebut menunjukkan pada akhir tahun 2009 75,5% penduduk Kota Pontianak yang telah mendapat pelayanan air bersih. Pada tahun 2006 PD. Air minum Kota Pontianak telah memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional.

Keberhasilan ini berkat semangat manajemen untuk merubah berbagai persoalan internal dan eksternal dalam pengelolaan perusahaan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Pembangunan infrastruktur jalan kota juga menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik. Pembangunan ini dilaksanakan melalui berbagai program antara lain PKPSBBM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), *Neighborhood Upgrading & Shelter Sector Project* (NUSSP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan bantuan stimulan material bangunan. Pada tahun 2006, jumlah jalan kota sebanyak 288 ruas dengan panjang keseluruhan sebanyak 281.653 m yang mana kondisi tersebut tidak banyak berubah hingga saat ini. Jalan yang memiliki status jalan kota sepanjang 234.600 m, jalan pusat dan propinsi masing-masing sepanjang 37.500 dan 10.600 m. Jika dilihat dari status jalan menurut kelas, hampir keseluruhan jalan yang ada di Kota Pontianak dikategorikan kedalam kelas III A dengan kondisi yang termasuk dalam kategori baik sebesar 66,31% atau sepanjang 181.473 Km pada tahun 2005. Kondisi wilayah yang rentan terhadap erosi dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan kualitas jalan yang dibangun cepat mengalami kerusakan.

Perbaikan kualitas jalan lingkungan selama 5 tahun juga dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas jalan lingkungan di seluruh wilayah kota yang ditangani melalui berbagai program pembangunan. Pembangunan fasilitas perekonomian juga dapat dilihat semakin bertambahnya pasar-pasar swalayan yang cukup merata pada pusat-pusat pertumbuhan masing-masing wilayah kecamatan.

Pembangunan bidang persampahan relatif cukup baik, pada tahun 2006 pelayanan persampahan mencapai 82%, tahun 2007 mencapai 82,50%, dan kemudian meningkat lagi menjadi 83% pada tahun 2008. Pola penanganan persampahan masih terpusat pada wilayah-wilayah padat penduduk dan kawasan padat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga kawasan pinggiran kota masih belum terlayani secara maksimal. Sedangkan pengelolaan pada tempat pembuangan akhir sampah belum dilakukan secara sanitasi *landfield* agar tumpukan sampah tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

Pembangunan selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif seperti adanya ketimpangan pembangunan antar kawasan, meningkatnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya pengangguran dan lain-lain. Permasalahan yang cukup menonjol di Kota Pontianak adalah terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan.

Kawasan yang cukup pesat pertumbuhannya berada di bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Barat dan Pontianak Kota, sedangkan bagian timur dan utara pertumbuhannya sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan kawasan permukiman baru dan pembangunan fasilitas kota sebagian besar terkonsentrasi di bagian selatan terutama Pontianak Selatan, Pontianak Kota dan Pontianak Barat. Sementara pembangunan perumahan baru dan fasilitas kota lainnya di Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur relatif sangat kecil.

Ketimpangan pembangunan antar bagian wilayah kota tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan pada masing-masing bagian wilayah kota. Pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat di bagian selatan didorong oleh adanya pusat-pusat pelayanan masyarakat sebagian besar berada di wilayah bagian

selatan. Konsentrasi pusat pelayanan, infrastruktur kota dan utilitas kota lainnya mendorong minat masyarakat untuk bertempat tinggal di wilayah bagian selatan. Demikian juga halnya dengan pembangunan utilitas kota yang dilaksanakan oleh swasta cenderung dibangun di bagian selatan, sehingga wilayah bagian timur dan utara mempunyai utilitas kota yang relatif sangat terbatas. Kondisi ini juga tidak terlepas dari alokasi pembiayaan pembangunan antar wilayah yang kurang seimbang dalam mendukung percepatan pembangunan di Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur.

Ketimpangan pembangunan juga tidak terlepas dari penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. Sebagian besar penduduk Kota Pontianak berada di wilayah bagian selatan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kota dan Pontianak Barat yaitu sebesar 67% yang menempati 57,33% luas wilayah kota, jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Timur sebesar 13 % menempati 8,14% luas wilayah kota dan jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Utara sebesar 21% menempati 34,52% luas wilayah kota, sehingga terjadi ketimpangan pemerataan jumlah penduduk antar wilayah kecamatan yang berdampak pada ketidakseimbangan percepatan pembangunan antar wilayah.

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan selama 5 tahun terakhir sudah mulai menampakkan perubahan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sudah semakin membaik.

Perubahan peran serta masyarakat kearah yang lebih baik dalam proses pembangunan tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Pontianak yang menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan atau penerima manfaat semata, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini semakin memperkecil ketergantungan masyarakat pada pemerintah, khususnya dalam proses pembangunan prasarana lingkungan.

Jumlah KK miskin, daerah kumuh dan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pontianak Timur dimana jumlah KK miskin sebesar 5,553 kepala keluarga, kawasan kumuh seluas 62.82 Ha dan kepadatan penduduk sebesar 16,720 jiwa. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pontianak Selatan, dimana jumlah KK miskin sebesar 1,491 kepala keluarga, kawasan kumuh seluas 38.95 Ha dan kepadatan penduduk sebesar 8,881 jiwa.

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di Kota Pontianak sendiri berdasarkan data tabel di bawah menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel. 2.2
Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah KK dan KK Miskin Tahun 2003-2009

No	Tahun	Jumlah Pddk	Jumlah KK	KK Miskin	%	BLT/Raskin (KK)	%
1	2003	453.459	126.049	19.818	15,72	7.681	38,76
2	2004	478.740	131.241	20.892	15,92	8.567	6,53
3	2005	494.441	136.433	21.130	15,49	19.700	14,44
4	2006	513.645	140.354	21.368	15,22	13.842	9,86
5	2007	523.485	135.192	21.474	15,88	19.700	14,57
6	2008	565.789	143.422	21.474	14,97	19.700	14,41
7	2009	595.601	159.868	19.700	13,32	19.612	12,27

Sumber : Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Pontianak, 2010

Dalam situasi krisis yang berkepanjangan, tahun 2005 pemerintah pusat telah membuat kebijakan untuk meringankan beban masyarakat kelompok miskin melalui berbagai program antara lain bantuan program pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur kota, beras untuk masyarakat miskin dan bantuan tunai langsung serta bantuan beras miskin. Jika dilihat dari perkembangannya jumlah bantuan raskin yang disalurkan pada tahun 2003 sebanyak 7.681 KK atau 38,76% kemudian meningkat di tahun 2004 menjadi 8.567 KK atau 41,01% dan pada tahun 2006 melalui program yang sama jumlah KK miskin yang mendapat bantuan sebanyak 13.842 KK atau 64,78% dari total keseluruhan KK miskin yang ada. Untuk penyaluran BLT pada tahun 2005 jumlah KK yang mendapat bantuan sebanyak 19.700 KK atau 93,23% dari total keseluruhan KK miskin, kemudian meningkat di tahun 2008 menjadi 19.800 KK atau 92,20%.

Dalam pelaksanaannya sebagian program cukup berhasil dan sebagian program kurang berhasil dan bahkan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Keterbatasan pembiayaan program dalam meringankan kelompok masyarakat miskin menyebabkan program tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan secara umum mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat, meningkatkan jumlah penduduk miskin, dan menurunnya kemampuan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana publi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat telah dilakukan melalui dengan berbagai program antara lain penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan sarana dan prasarana dasar perkotaan, peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Program-program tersebut dimaksudkan untuk membantu meringankan beban masyarakat akibat dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun demikian, upaya yang dilakukan belum mampu mengatasi permasalahan tersebut secara tuntas, sehingga masih banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian secara serius dan berkelanjutan.

Kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran menjadi masalah yang serius bagi daerah perkotaan sebagai akibat daerah perkotaan menjadi harapan satu-satunya bagi pencari kerja untuk merubah nasibnya dalam situasi dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih kembali. Salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja perkotaan adalah sektor informal yang tidak

menuntut kualifikasi tertentu dan dapat dilakukan dimana saja. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memasuki sektor informal kurang mampu diimbangi dalam penyediaan ruang berusaha, sehingga banyak ruang publik yang digunakan oleh sektor informal dan menyebabkan terjadinya kekumuhan di beberapa bagian kota. Sementara tempat berusaha yang tersedia seperti pasar-pasar tradisional kondisinya semakin memburuk dan tidak lagi mampu menampung jumlah pedagang informal yang jumlahnya semakin meningkat.

Kesenjangan pendapatan masyarakat yang semakin tinggi berdampak pada semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di perkotaan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan salah satu pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak. Berbagai upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin telah dilakukan oleh pemerintah, namun demikian usaha tersebut belum mampu menurunkan jumlah miskin yang relatif besar jumlahnya yaitu 15,3% dari jumlah penduduk Kota Pontianak. Oleh karena itu, berbagai program pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai pendekatan baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Peningkatan kinerja pelayanan publik saat ini menjadi tuntutan yang mengemuka dalam era otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan amanat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik diperlukan sumberdaya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mekanisme pelayanan yang jelas, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah kota sampai saat ini masih dirasakan belum memenuhi harapan.

Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas diperlukan inovasi dan perubahan yang mendasar dalam manajemen pelayanan publik. Semangat untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik akan menjadi dasar terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga memberikan dampak semakin meningkatnya jumlah kriminalitas. Kondisi ini dapat memberikan gambaran kurangnya jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat di Kota Pontianak. Selain itu potensi kerawanan sosial yang masih cukup tinggi yang bersumber dari keanekaragaman budaya, suku dan agama perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah. Upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan perekonomian kota memerlukan jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban. Lemahnya penegakan hukum yang ada di Kota Pontianak berdampak semakin memburuknya ketertiban umum walaupun upaya penegakan hukum terus dilakukan.

Pengaruh pasang surut air laut dan daya dukung lahan yang sangat rendah merupakan kendala utama dalam menciptakan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas di Kota Pontianak. Sebagai besar wilayah permukiman terpengaruh pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap pola permukiman dan struktur bangunan. Dengan kondisi yang demikian pembangunan infrastruktur kota maupun pembangunan permukiman membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kemampuan masyarakat untuk membangun permukiman dan lingkungan yang sehat masih terbatas. Upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang dilakukan selama ini belum mampu menagani seluruh wilayah akibat keterbatasan

pembiayaan pembangunan yang ada, sehingga perlu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maupun kelestarian pembangunan.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar sebagian besar kurang menunjang dalam proses pembelajaran. Kondisi bangunan sekolah dasar lebih dari 15% dalam kondisi rusak sampai rusak berat. Upaya perbaikan dan peningkatan bangunan sekolah dasar negeri dan swasta yang dilakukan setiap tahun belum mampu mengimbangi penurunan kondisi bangunan sekolah yang sudah tua dan jumlahnya cukup besar. Selain sarana dan prasarana sekolah dasar yang kurang memadai juga sumberdaya guru belum sepenuhnya layak untuk mengajar. Komitmen pemerintah kota untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar perlu didukung manajemen yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari penyiapan kualitas guru yang memadai, kurikulum yang mendorong kreativitas siswa, dan tersedianya sarana pendukung yang baik seperti buku mata pelajaran dan laboratorium. Untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah atas agar dapat bersaing di pasaran kerja diperlukan peningkatan kemampuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Meningkatnya jumlah penderita penyakit musiman seperti DBD, diare, muntaber yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa penanganan kesehatan masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal. Angka kesakitan penyakit DBD pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2006 angka kesakitan DBD sebesar sebesar 242,7 per 100.000 penduduk yang secara epidemiologis dikategorikan telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), kemudian menurun secara signifikan pada tahun 2007 menjadi 48 kasus per 100.000 penduduk. Kasus gizi buruk naik dari 34 kasus di tahun 2005 menjadi 42 kasus di tahun 2006 dan pada tahun 2007 menurun menjadi 29 kasus. Kasus kematian Ibu mengalami kenaikan dari target 6 kasus, data tahun 2006 menunjukkan 18 kasus. Berdasarkan data puskesmas diketahui kasus kematian bayi mengalami kenaikan dari 33 kasus di tahun 2005 menjadi 184 kasus di tahun 2006. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit musiman akibat nyamuk *Aedes Aegypti* sulit diberantas dan menimbulkan korban yang terus meningkat. Kondisi lingkungan yang buruk dan perilaku masyarakat yang kurang baik akan mempengaruhi jumlah penderita penyakit musiman setiap tahunnya. Kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik ini perlu ditangani secara serius agar korban akibat penyakit musiman menurun. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan secara terus menerus baik dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun penyediaan tenaga medis yang memadai diseluruh wilayah bagian kota. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus digalakkan agar dapat mengurangi jumlah korban penderita penyakit musiman yang terjadi setiap tahunnya.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian secara serius adalah bagaimana upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, mengurangi permukiman dan rumah kumuh, mengurangi jumlah pengangguran dan menyediakan infrastruktur dan suprastruktur kota yang merata, adil dan mampu menjangkau seluruh wilayah bagian kota serta mampu memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan kota secara umum.

Dalam 3 tahun terakhir capaian pembangunan di kota Pontianak cukup baik. Hampir semua target indikator keberhasilan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis Kota Pontianak 2004-2009 dapat dipenuhi. Hasil-hasil capaian tersebut terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2006-2009

No.	INDIKATOR	2006	2007	2008	2009*
I. UMUM					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71	71.5	72	72.5
	- Angka Melek Huruf (%)	93.6	94.3	95	97.5
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	68.04	66.04	70.29	71.40
	- Pengeluaran Riil per kapita (Rp./bln)	625.2	626.5	627.9	629.3
	- Lama sekolah (tahun)	9.1	9.2	9.4	9.5
2	Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)	23.27	22.77	22.37	21.79
II. BIDANG EKONOMI					
1	Angka Kemiskinan (%)	14.9	14.6	14.41	14.12
2	Angka Pengangguran Terbuka (%)	9.58	8.6	8.5	7.91
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.04%	5.29%	5.05%	5.14%
4	Inflasi (%)	6.32%	8.56%	11.19%	7.84%
5	PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta)	5,477,863.74	5,759,759.75	6,069,439.25	6,390,721.34
6	PDRB Berlaku 2000 (Rp. Juta)	7,555,118.47	8,382,573.78	9,208,771.80	10,776,744.66
7	PDRB per kapita konstan (Rp.)	10745038.75	11,243,265.41	11,388,054.34	11,767,529.75
8	PDRB per kapita berlaku (Rp.)	14819653.18	16,394,774.83	17,870,933.19	19,843,716.64
III. BIDANG KESEHATAN					
1	Angka Kematian Bayi	4.60%	5.90%	4.30%	4%
2	Gizi Buruk (kasus)	0.07%	0.04%	0.04%	0.03%
IV. BIDANG PENDIDIKAN					
1	APM SD (%)	86.88	86.82	98.15	100.93
	APM SLTP (%)	70.54	70.31	77.99	79.72
	APM SLTA (%)	65.02	64.08	63.14	61.48
2	APK SD (%)	101.57	100.78	99.73	98.49
	APK SLTP (%)	99.45	99.59	119.99	125.22
	APK SLTA (%)	101.59	102.53	103.47	104.42

No.	INDIKATOR	2006	2007	2008	2009*
3	Angka Putus Sekolah SD	0.18	0.17	0.16	0.13
	Angka Putus Sekolah SLTP	0.28	0.24	0.2	0.16
	Angka Putus Sekolah SLTA	0.87	0.86	0.85	0.84
4	Kelayakan Mengajar Guru SD	92.92	93.49	94.06	94.77
5	Kelayakan Gedung SD	90.24	93.09	95.94	107.42
6	NEM rata-rata SD/MI	6.53	6.6	6.67	6.78
7	NEM rata-rata SLTP/MTs	6.3	6.47	6.64	7.24
8	NEM rata-rata SMU/MA	5.51	5.55	5.59	5.63
BIDANG					
V. INFRASTRUKTUR					
1	Tingkat Pelayanan Air Bersih	70.60%	72.00%	73.90%	75.50%
2	Jumlah Sambungan PDAM	63,607	65,972	68,627	71,327
3	Kondisi Jalan Kota Mantab	31%	42.65%	57.65%	62%
4	Cakupan Pelayanan Kebersihan	82%	82.50%	83%	83%

* angka sementara (target)

2.3. Isu-Isu dan Permasalahan Strategis Pembangunan

Pemahaman terhadap kondisi dan fenomena riil yang berkembang di masyarakat mutlak diperlukan untuk menentukan tindakan penanganan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Secara garis besar, permasalahan pokok yang perlu dapat perhatian secara serius dan menjadi prioritas penanganan Pemerintah Kota Pontianak ditahun anggaran 2011 tidak berbeda jauh dari permasalahan tahun-tahun sebelumnya yaitu:

2.3.1 Permasalahan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Kesempatan belajar pada tiap jenjang pendidikan terutama bagi masyarakat miskin belum merata.
2. Kualitas guru yang mengajar dan memiliki sertifikat pada tiap jenjang pendidikan masih terbatas.
3. Kualitas/mutu pendidikan pada tiap jenjang belum merata.
4. Penyelenggaraan pendidikan kurang efektif dan efisien.
5. Adanya kesenjangan antara output pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.
6. Akses masyarakat miskin ke layanan kesehatan masih terbatas.
7. Fasilitas kesehatan masyarakat belum memadai.
8. Kualitas dan kuantitas tenaga medis masih terbatas.
9. Kualitas pelayanan kesehatan belum maksimal.
10. Kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat belum maksimal.

2.3.2 Permasalahan dalam Pengembangan Perekonomian Daerah

1. Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.
2. Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah.
3. Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang, kesulitan dalam pemasaran dan mutu produk yang dihasilkan kurang bersaing.
4. Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif.
5. Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat.
6. Masih cukup banyak pedagang informal yang belum memiliki tempat usaha yang layak.
7. Daya tarik obyek wisata yang ada masih rendah, belum dikelola secara optimal dan belum memiliki konsep pengembangan wisata yang jelas sesuai potensi yang ada.

2.3.3 Permasalahan dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

1. Masih cukup banyak terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang kualitas lingkungannya kurang baik maupun kumuh.
2. Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota.
3. Kuantitas dan kualitas pelayanan serta tata kelola utilitas kota (air bersih, drainase, jalan, persampahan) masih terbatas.
4. Kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih belum optimal.
5. Pembinaan dan penyediaan sarana/prasarana olahraga, kepemudaan dan kebudayaan belum maksimal.
6. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah kota belum maksimal dalam menunjang pelayanan publik.
7. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintah masih belum memadai.
8. Penyediaan dan penataan ruang terbuka hijau masih belum memadai dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku.
9. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur kota secara umum masih belum optimal.
10. Masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas dan berkendara belum tertib.

2.3.4 Permasalahan dalam Pelayanan Publik, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum dan Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

1. Standar pelayanan minimum dalam penyediaan layanan-layanan publik belum tercapai.
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada belum cukup baik.

3. Pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membuang sampah sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan belum optimal.
4. Penegakan hukum dan penegakan peraturan daerah belum maksimal.
5. Sistem dan pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Pontianak pada tahun anggaran 2011 berupaya untuk mengeliminir hal tersebut dengan menyusun kembali strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah serta kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Secara garis besar arah kebijakan pembangunan di tahun 2011 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM Kota Pontianak 2010-2014 ditujukan untuk meletakkan dasar yang kokoh dalam pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu fokus perhatian pendanaan dan penyusunan program pembangunan akan ditekankan pada beberapa sektor yang menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pontianak seperti peningkatan SDM dan pelayanan publik dengan sektor-sektor lainnya sebagai penunjang dalam percepatan pembangunan kota Pontianak.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA PONTIANAK TAHUN 2011

Penyampaian kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan tahun mendatang kepada khalayak luas/masyarakat akan memberikan gambaran perkiraan pergerakan perekonomian suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaan pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang di suatu daerah.

Proyeksi kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan juga merupakan bagian dari variabel yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, serta perkembangan belanja pada suatu daerah. Untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan Kota Pontianak tahun 2011, terlebih dahulu dikemukakan perkiraan kondisi ekonomi tahun 2010 (tahun berjalan) yang mencakup:

A. Indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011.

Perkembangan perekonomian secara nasional pada tahun-tahun belakangan mengalami pertumbuhan yang melambat akibat krisis keuangan dunia. Akan tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain didunia, negara kita menjadi salah satu dari tiga negara di dunia yang masih mengalami pertumbuhan positif yaitu negara China, India dan Indonesia.

Perkembangan perekonomian nasional yang melambat ini juga dialami oleh Kota Pontianak, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 5,45%, pada tahun 2008 5,42%, tahun 2009 diperkirakan mengalami sedikit penurunan kembali menjadi 5,14%, dan perkiraan pada tahun 2010 ini ditargetkan meningkat kembali menjadi 5,60%.

Untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2011 akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,85%, dengan asumsi kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sebesar Rp. 5,26 triliun, dengan kontribusi investasi pemerintah sebesar Rp. 1,102 triliun berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBD Kota Pontianak, sedangkan kontribusi dari pihak swasta dan masyarakat sebesar Rp. 4,157 triliun.

Berdasarkan terbitan terakhir Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2009, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 adalah sebesar 5,42%, angka ini didapat dari adanya peningkatan PDRB Kota Pontianak menurut harga konstan 2000 dimana tahun 2007 sebesar Rp. 5.661.253,65 juta meningkat menjadi Rp. 5.968.286,55 juta tahun 2008.

Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2005 sampai 2008, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak rata-rata tumbuh sebesar 5,15% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 5,45% per tahun. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 4,78%.

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak
Tahun 2005-2008

Sektor	2005	2006	2007	2008
Pertanian	4,14	4,05	5,77	4,56
Pertambangan & Pengendalian				
Industri Pengolahan	4,86	6,77	5,01	4,47
Listrik, Gas & Air Bersih	5,83	1,55	5,07	5,31
Bangunan	6,13	5,35	5,35	5,13
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,07	5,55	6,65	7,00
Pengangkutan & Komunikasi	4,62	4,15	5,90	7,81
Keuangan, Persewaan & Jasa Persh	5,71	4,89	5,31	4,80
Jasa-jasa	3,11	4,18	4,13	2,70
PDRB	4,78	4,96	5,45	5,42

Sumber : PDRB menurut Sektoral Kota Pontianak 2005-2008 (BPS)

Sektor ekonomi yang tumbuh paling tinggi di tahun 2008 adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 7,81% sedangkan sektor yang tumbuh paling rendah adalah sektor Jasa-jasa yaitu sebesar 2,70%. Selama kurun waktu 2005-2008 sektor yang mengalami pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 6,07%. Sedangkan sektor Jasa-jasa pertumbuhan rata-rata terendah yaitu sebesar 3,53%.

B. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2009.

Pendapatan daerah Kota Pontianak tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp. 637.703.245.944,00 dengan realisasi sebesar Rp. 618.596.876.230,53 atau 96,46%, dan tahun 2009 pendapatan daerah meningkat menjadi Rp. 701.265.336.076,77 dengan realisasi sebesar Rp. 666.306.493.928,90 atau 95,01%.

Tabel 3.2.
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2008-2009

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2008	637.703.245.944,00	618.596.876.230,53	96,46
2.	2009	701.265.336.076,77	666.306.493.928,90	95,01

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kota Pontianak ditargetkan sebesar Rp. 693.454.925.250,-, sedangkan perkiraan pendapatan daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 712.524.935.694,37 atau meningkat 2,75% dari tahun sebelumnya.

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan pengaturan dan pelaksanaan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk pengelolaan pendapatan asli daerah, kebijakan dan pelaksanaannya melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dengan melaksanakan berbagai upaya seperti:

- a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan potensi serta kemampuan wajib pajak.
- d. Instensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah :
 - ⇒ Intensifikasi antara lain dengan cara :
 - Menerbitkan dan merevisi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
 - Meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan.
 - Melaksanakan peremajaan data base wajib pajak.
 - Mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah.
 - Menyediakan pelayanan satu atap perizinan.
 - ⇒ Ekstensifikasi antara lain dengan cara :
 - Mempermudah pemberian izin usaha kepada investor dan masyarakat.
 - Melakukan kerja sama pemungutan pajak/retribusi daerah dengan pihak PT. PLN Cabang Pontianak dan PDAM Kota Pontianak berkenaan Pajak Penerangan dan Restribusi Kebersihan.

C. Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2008-2009.

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar dan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2008-2009

No.	Uraian	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1.	Tahun 2008			
	Belanja Daerah	669.948.334.886,31	633.551.744.354,22	94,57
	Belanja Tidak Langsung	319.025.093.719,31	308.048.813.911,24	96,56
	Belanja Langsung	350.923.241.167,00	325.502.930.442,00	92,76
2.	Tahun 2009			
	Belanja Daerah	720.378.810.826,87	658.842.306.673,92	91,46
	Belanja Tidak Langsung	340.535.975.010,87	315.971.691.096,43	92,76
	Belanja Langsung	379.842.835.816,00	342.870.615.577,49	91,46

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Dilihat dari belanja langsung terdapat peningkatan dimana pada tahun 2008 sebesar Rp. 325.502.930.442,00 meningkat menjadi Rp. 342.870.615.577,49 pada tahun 2009. Jika dilihat dari segi penggunaannya belanja langsung pada bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak pada tahun 2009 alokasi anggaran sebesar Rp. 128.785.264.750,- direalisasikan sebesar Rp. 120.373.323.605,- atau 93,47% terdiri dari 14 Program dan 78 Kegiatan. Sedangkan pada tahun 2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 137.138.345.000,- terdiri dari 13 Program dan 75 Kegiatan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Bidang Pendidikan pada tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dialokasikan sebesar Rp. 63.954.866.222,- direalisasikan sebesar Rp. 56.855.133.778,- atau 89,01% terdiri dari 9 Program dan 87 Kegiatan, sedangkan pada tahun 2010 dialokasikan dana sebesar Rp 70.242.400.000,- terdiri dari 9 program dan 106 Kegiatan.

Untuk bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 19.373.902.594,- dan direalisasikan sebesar Rp. 18.563.634.055,- atau 95,82 % terdiri dari 17 program dan 97 kegiatan, sedangkan pada tahun 2010 dialokasikan dana sebesar Rp 18.214.867.450,- dan akan melaksanakan sebanyak 18 program dan 92 Kegiatan.

Secara garis besar belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, sosial maupun sarana dan prasarana/infrastruktur yang layak.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Pontianak difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3.1. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2007-2008.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka PDRB, Investasi, Inflasi, Pajak dan Retribusi, Pinjaman dan Pelayanan Bidang Ekonomi. Besaran nilai PDRB ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sebagaimana tergambar dari PDRB selama kurun waktu 2007-2008 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup positif dimana pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45%, sedangkan untuk tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42%.

Tabel 3.4.
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
 Menurut Lapangan Usaha Kota Pontianak
 2005-2008 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2007	2008
1	Pertanian	76.941,17	80.451,76
	Tanaman Bahan Makanan	18.858,83	19.706,18
	Tanaman Perkebunan	0,00	0,00
	Peternakan dan hasil-hasilnya	12.941,87	13.751,12
	Kehutanan	0,00	0,00
	Perikanan	45.140,47	46.994,46
2	Pertambangan dan galian	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	489.225,24	511.114,13
4	Listrik, Gas & Air Bersih	33.039,40	34.793,25
	Listrik	23.752,53	25.053,37
	Air Bersih	9.286,88	9.739,88
5	B a n g u n a n	943.027,49	991.396,43
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.297.527,48	1.388.309,79
	Perdagangan Besar dan Eceran	1.190.991,71	1.275.351,35
	Restoran	75.244,15	33.772,32
	Hotel	31.291,63	79.186,11
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.008.137,98	1.086.894,10
	Pengangkutan	785.169,85	840.262,76
	Komunikasi	222.968,13	246.631,34
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	616.833,89	646.463,09
	Bank	247.766,35	258.182,97
	Lembaga Keuangan Tanpa Bank	182.060,02	190.971,07
	Jasa Penunjang Keuangan	374,84	391,11
	Sewa Bangunan	160.952,30	170.166,33
	Jasa Perusahaan	25.680,38	26.751,61
9	Jasa – Jasa	1.196.520,98	1.228.864,02
	Pemerintahan Umum	1.147.730,41	1.177.170,53
	Swasta	48.790,57	51.693,49
	Total Jumlah	5.661.253,65	5.968.286,55

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka

Secara umum peranan sektoral secara keseluruhan mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari besaran kontribusi sektor masing-masing yang menunjukkan peningkatan rata-rata diatas 4% dan hanya pada sektor pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang kurang signifikan. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor perdagangan, restoran & hotel sebesar 6,65% pada tahun 2007 sedangkan untuk tahun 2008 pada sektor ini menjadi 7,00% dan sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu tahun 2007 mengalami pertumbuhan 5,90% dan meningkat menjadi 7,81% pada tahun 2008.

Sektor pertanian mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 5,77% mengalami penurunan menjadi 4,56%, demikian juga halnya dengan sektor industri pengolahan dari 5,01% menjadi 4,47%, sektor bangunan 5,35% menurun menjadi 5,13%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dari 5,31% menurun menjadi 4,80% serta sektor jasa-jasa dari 4,31% menjadi 2,70%.

Tabel 3.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak
Tahun 2007-2008

Sektor	2007	2008
Pertanian	5,77	4,56
Pertambangan & Pengendalian		
Industri Pengolahan	5,01	4,47
Listrik, Gas & Air Bersih	5,07	5,31
Bangunan	5,35	5,13
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,65	7,00
Pengangkutan & Komunikasi	5,90	7,81
Keuangan, Persewaan & Jasa Persh	5,31	4,80
Jasa-jasa	4,13	2,70
PDRB	5,45	5,42

Sumber : PDRB menurut Sektoral Kota Pontianak 2005-2008 (BPS)

Struktur perekonomian Kota Pontianak selama empat tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti. Sektor-sektor tertentu seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Jasa-jasa dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi selalu memberikan kontribusi tertinggi didalam perekonomian Kota Pontianak. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selama kurun waktu 2007-2008 selalu menunjukkan peningkatan peranannya meskipun peningkatannya perlahan. Pada tahun 2007 peranannya sebesar 23,12% dan tahun 2008 telah menjadi 24,01%. Sektor Jasa-jasa meskipun peranannya tetap tertinggi namun mengalami penurunan peranannya. Tahun 2008 peranannya menurun menjadi 20,20%. Pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi terjadi peningkatan peranan. Tahun 2007 peranannya sebesar 18,20% dan ditahun 2008 peranannya meningkat menjadi 18,78%.

Tabel 3.6.
Struktur Perekonomian Kota Pontianak
Tahun 2007-2008 (persen)

Sektor	2007	2008
Pertanian	1,67	1,66
Pertambangan & Pengendalian	0,00	0,00
Industri Pengolahan	7,86	7,82
Listrik, Gas & Air Bersih	0,50	0,49
Bangunan	17,07	16,80
Perdagangan, Hotel & Restoran	23,12	24,01
Pengangkutan & Komunikasi	18,20	18,76
Keuangan, Persewaan & Jasa Persh	10,47	10,27
Jasa-jasa	21,12	20,20
PDRB	100,00	100,00

Tingkat penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor ekonomi bisa mencerminkan pada sektor ekonomi mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekaligus mencerminkan bahwa sektor ekonomi tersebut dominan peranannya dalam meningkatkan PDRB. Sektor pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada meningkatkan kualitas manusia dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan ditujukan untuk memperluas lapangan kerja produktif, baik dalam jumlah maupun mutunya. Untuk itu melalui pembangunan ketenagakerjaan diharapkan terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah pengangguran, pengurangan ketimpangan produktivitas antar sektor, transformasi tenaga kerja antar sektor serta peningkatan kesempatan angkatan kerja.

Pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja yang terserap berdasarkan sektor lapangan kerja sebanyak 234.239 orang. Sebagian besar tenaga kerja terserap disektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 118.488 orang, sektor jasa sebanyak 45.090 orang, sektor industri sebanyak 21.946 orang dan sektor pengangkutan/komunikasi sebanyak 18.165 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 sektor perdagangan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 125.883 orang, sektor jasa-jasa menyerap sebanyak 45.721 orang, sektor industri sebanyak 21.727 orang dan sektor pengangkutan menyerap tenaga kerja sebanyak 18.733 orang sehingga total penyerapan tenaga kerja seluruhnya mencapai 243.457 orang.

Tabel 3.7.
Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan Sektor Lapangan Kerja Tahun 2007-2008

No	Lapangan Usaha	2007	2008
1	Pertanian	9,221	9,323
2	Pertambangan dan galian	145	150
3	Industri Non Migas	21,946	21,727
4	Listrik Dan Air Minum	1,400	1,446
5	B a n g u n a n	17,404	18,057
6	Perdagangan, Hotel, Dan Restoran	118,488	125,883
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	18,165	18,733
8	Keuangan, Persewaan & jasa persh	2,379	2,416
9	Jasa – Jasa	45,090	45,721
	Jumlah	234,239	243,457

Sumber : BPS Kota Pontianak

Perkembangan ekonomi makro dengan agregat pendapatan regional dan pendapatan regional per kapita tahun 2007-2008 terdapat peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari PDRB berdasarkan harga berlaku, tahun 2007 mencapai Rp. 8,323,372,25 (dalam Jutaan) dan tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 9,506,999.16 PDRB perkapita tahun 2007 mencapai Rp. 16,07 juta dan meningkat menjadi Rp. 18,08 juta. Pendapatan regional perkapita pada tahun 2007 mencapai Rp.14,72 juta dan meningkat menjadi Rp. 16,56 juta tahun 2008. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 5,661,253.65 juta tahun 2007 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 5,968,286.55 juta. PDRB perkapita tahun 2007 mencapai Rp.10,93 juta dan meningkat menjadi Rp. 11,52 juta tahun 2008 dan Pendapatan regional perkapita pada tahun 2007 sebesar Rp. 10,01 juta dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 10,55 juta.

Tabel 3.8.
Agregat Pendapatan Regional dan Pendapatan Regional Per Kapita
Di Kota Pontianak Tahun 2007-2008

No.	Uraian	2007	2008
Harga Berlaku			
1	PDRB Atas Dasar Harga Pasar	8.323.372,25	9.506.999,16
2	Penyusutan	573.480,35	655.032,24
3	PDRN Atas Dasar Harga Pasar	7.749.891,91	8.851.966,92
4	Pajak Tak Langsung	126.515,26	144.506,39
5	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi	7.623.376,65	8.707.460,53
6	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	517.834,67	525.577,86
7	PDRB Perkapita (Rupiah)	16.073.416,46	18.088.660,00
8	Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	14.721.642,13	16.567.403,70
Harga Konstan			
1	PDRB Atas Dasar Harga Pasar	5.661.253,65	5.968.286,55
2	Penyusutan	390.060,38	411.214,94
3	PDRN Atas Dasar Harga Pasar	5.271.193,27	5.557.071,61
4	Pajak Tak Langsung	86.051,06	90.717,96
5	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi	5.185.142,22	5.466.353,65

No.	Uraian	2007	2008
Harga Berlaku			
6	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	517.834,67	517.835,67
7	PDRB Perkapita (Rupiah)	10.932.550,51	11.525.445,11
8	Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	10.013.123,01	10.556.155,18

Sumber: BPS Kota Pontianak

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2010-2011

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran tantangan dan peluang Pemerintah Kota Pontianak menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini ditinjau dari sumber daya tersedia serta kemampuan memotivasi, membina, mengarahkan serta mengawasi pelaku pembangunan. Tinjauan ini juga bersifat internal terhadap kondisi dan potensi Pemerintah Kota Pontianak serta kondisi eksternal yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan ekonomi. Dalam lingkup regional, nasional dan internasional, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) posisi Kota Pontianak diarahkan sebagai berikut:

Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi pintu gerbang ke kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya.
2. Letak Kota Pontianak berdekatan dengan Kuching (Malaysia Timur), Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam), Singapura, dan ini memberikan implikasi, aksesibilitas dan kinerja pelabuhan (udara/laut), terminal antar negara, maupun dengan wilayah sekitarnya perlu ditingkatkan kualitasnya.
3. Sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional dan regional.
4. Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
5. Sebagai pusat jasa pemerintahan secara nasional atau meliputi beberapa provinsi.
6. Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
7. Sektor Unggulan Wilayah Hinterland Kota Pontianak, seperti tanaman pangan, perkebunan, industri dan perikanan laut dan darat. Kota Pontianak sebagai pendorong daerah sekitarnya sehingga harus tersedia fasilitas dan ruang dalam rangka memberikan jasa pelayanan untuk mawadahi kegiatan sektor unggulan di kawasan sekitarnya.
8. Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, dimanan Kota Pontianak menjadi simpul penyebar kegiatan ekonomi terhadap Kota Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang. Sehingga diperlukan integrasi saling menguntungkan dengan kota-kota tersebut, diperlukan aksesibilitas tinggi untuk menghubungkan kota tersebut dengan Kota Pontianak.
9. Sebagai Pusat Pelabuhan Internasional baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara yang berada di Kabupaten Kubu Raya yang berdekatan dengan Kota Pontianak. Peran ini berkaitan dengan ASEAN Free Trade Area dalam kawasan ASEAN.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013 pembangunan daerah mengedepankan:

- a. Pendekatan Perwilayahan
- b. Pemberdayaan Daerah kurang maju/tertinggal,
- c. Pengembangan Kawasan Khusus.

Dalam pengembangan perekonomian Kota Pontianak pada RPJM Propinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013, Kota Pontianak dikelompokkan sebagai wilayah Kota bersama Kota Singkawang yang memerlukan perlakuan pembangunan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan fungsi kota.

Berdasarkan *positioning analysis* diatas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis disimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan Kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:

a. Peluang

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan CAFTA (*China Asean Free Trade Area*).
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
4. Peran dan fungsi Kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan Nasional dan Provinsi yang mendukung pengembangan Kota.

b. Tantangan

1. Disparitas perkembangan antar kawasan yang meningkat.
2. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan.
3. Ketergantungan semakin besar kepada Pemerintah Pusat.
4. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistim struktur pelayanan wilayah.
5. Sarana dan prasarana perkotaan yang belum dapat berkompetisi dalam lingkup regional dan internasional.

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan **kekuatan** dan **kelemahan** yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan.

Secara geografis Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa, tepatnya pada posisi 0°02'24" LU-0°01'37" LS dan 109°16'25" BT-109°23'04" BT. Dengan luas lahan mencapai 10.782 Ha, dilintasi dua sungai besar (Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dan tidak jauh dari pantai. Struktur batuan adalah sedimen alluvial dan jenis tanah adalah tanah liat, dimana sekitar 32% top-soil tertutup lahan gambut.

Mempunyai ketinggian 0,8-1,5 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan berkisar 0-2% yang berarti topografinya cenderung datar dan miskin variasi kontur mengakibatkan wilayahnya rawan akan genangan air terutama dimusim penghujan dimana curah hujan cukup tinggi dengan rata-rata hari hujan mencapai 17 hari/bulan dengan curah hujan mencapai 249 mm/bulan.

Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja. Pada tahun 2008 penduduk Pontianak sebanyak 543.996 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya rata-rata sebesar 3,25 % per tahun selama periode 2003-2008. Penyebaran penduduk tidak merata di wilayah kota cenderung mengumpul di wilayah selatan Sungai Kapuas di

Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara.

Angkatan kerja di Kota Pontianak selama tahun 2004-2007 dapat dilihat dari perkembangan penduduk yang bekerja dari tahun 2004 sebanyak 210.140 orang jika dibandingkan dengan tahun 2007 jumlah penduduk yang bekerja meningkat menjadi 234.239 orang atau rata-rata tumbuh sebesar 5,22% pertahun, hal ini diimbangi dengan peningkatan jumlah pencari kerja dengan rata-rata pertahun sebesar 9,27% jiwa dengan tingkat prosentase penduduk bekerja terhadap jumlah angkatan kerja mencapai 86,84%. Proporsi tingkat pendidikan pencari kerja rata-rata merupakan tamatan yang mencaipat 56,35%. Sedangkan angka pengangguran dalam periode 2004-2007 mengalami penurunan dari 11,26% pada tahun 2004 menjadi sebesar 7,33% di tahun 2007 dengan tingkat pengangguran mencapai 7,12%. Di Kota Pontianak jumlah masyarakat miskin setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2007 mencapai 21.474 KK atau mencapai 6,77%.

Kondisi Perekonomian. Selama periode 2005-2008, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,15% per tahun. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2008 mencapai Rp. 18.088.660,- meningkat 10,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi kota terbentuk atas kontribusi tiga sektor utama yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,81%, Jasa-jasa 20,83%, Pengangkutan dan Komunikasi 20,35%, (tahun 2007). Terjadi ketimpangan pertumbuhan pembangunan antar kecamatan, namun setiap kecamatan memiliki potensi dan struktur perekonomian yang berbeda dan bisa diunggulkan.

Sumber Daya Aparatur. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak tercatat sejumlah 7.147 orang termasuk profesi guru, adapun jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 68 orang, golongan II sebanyak 1.310 orang, golongan III sebanyak 3.399 orang dan golongan IV sebanyak 2.370 orang.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sebagai berikut:

a. Kekuatan

1. Kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan *sustainable*.
2. Dukungan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik dari pemerintah pusat, PAD maupun dari partisipasi masyarakat/swasta.
3. Hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang semakin kondusif.
4. Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat yang semakin besar.
5. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal dasar pembangunan.
6. Jumlah aparatur pemerintah yang cukup memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.
7. Kewenangan yang dimiliki pemerintah kota semakin luas untuk menunjang kemandirian.
8. Memiliki standar operasional prosedur yang cukup baik.

b. Kelemahan

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap gangguan genangan dan banjir.
2. Penguasaan teknologi dan kemampuan bahasa asing masih belum merata.
3. Sarana dan prasaranan penunjang pembangunan yang belum sesuai kebutuhan.
4. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal.

5. Distribusi dan manajemen keuangan belum cukup efisien.
6. Perilaku sebagian aparat pemerintah uang belum berubah.
7. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota.
8. Masih ada potensi konflik dan kerawanan sosial antar suku, ras dan agama
9. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
10. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
11. Masih relatif lemahnya penegakan hukum.
12. Produktivitas lahan yang belum optimal sesuai peruntukannya.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2011

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014 dicantumkan untuk pengembangan wilayah dilaksanakan kebijakan:

Program Kewilayahan Internal

Program kewilayahan internal merupakan upaya untuk menyeimbangkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap perkembangan ekonomi antar wilayah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Sepanjang periode 2004-2006 pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mencapai rata-rata 5,1 % per tahun. Akan tetapi tingkat pertumbuhan tersebut tidak merata di antara kelima kecamatan yang ada. Ketimpangan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pontianak Utara sebesar 3,98%, Pontianak Timur sebesar 3,94% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pontianak Barat 5,13%, Pontianak Kota sebesar 5,04% dan Pontianak Selatan sebesar 5,19%.

Indikator lain yang menunjukkan ketimpangan wilayah tersebut adalah tingginya perbedaan PDRB perkapita antar kecamatan, dimana di Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp. 13.046.784, Pontianak Timur sebesar Rp. 8.024.531, Pontianak Barat sebesar Rp. 6.784.014, Pontianak Kota sebesar Rp. 22.880.267 dan Pontianak Selatan sebesar Rp. 19.555.127.

Apabila ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan seperti di atas terus berlanjut, maka dikhawatirkan pada masa-masa mendatang akan menimbulkan berbagai persoalan yang cukup serius, di antaranya :

1. Makin tajamnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antarkecamatan, dimana kecamatan yang kuat akan semakin sejahtera dan kecamatan yang lemah kian tertinggal. Hal ini pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial.
2. Menumpuknya kegiatan ekonomi (*over capacity*) di wilayah tertentu, yang selanjutnya bisa mengganggu keseimbangan lingkungan maupun daya dukung lahan.
3. Tidak meratanya penyebaran penduduk antar kecamatan: meningkatnya migrasi penduduk ke wilayah yang sangat maju pertumbuhannya ekonominya, namun jumlah pengangguran kian bertambah di wilayah yang lamban pertumbuhannya ekonominya.
4. Terjadinya *idle capacity* maupun *idle spatial* (lahan kosong) di wilayah yang potensial akibat tidak tergarap secara optimal.
5. Tidak meratanya pembangunan prasarana dan sarana wilayah, baik dalam bentuk transportasi, energi, komunikasi, air bersih, fasilitas ekonomi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur wilayah lainnya. Kondisi seperti ini juga tidak kondusif bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.
6. Kemungkinan timbulnya berbagai persoalan lainnya.

Disamping itu terdapat perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan baik berdasarkan kondisi fisik wilayah maupun potensi yang timbul sebagai *multiplier effect* berkembangnya wilayah.

Untuk mengantisipasi agar berbagai persoalan di atas tidak menjadi kenyataan, maka harus merancang strategi pembangunan wilayah yang berorientasi pada eksploitasi potensi

yang dimiliki masing-masing kecamatan diselaraskan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan, sehingga mampu mencapai visi kota Pontianak sebagai Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka tidak hanya diperlukan kebijakan-kebijakan fundamental, melainkan juga berbagai kebijakan intervensi yang selektif dan signifikan.

Kebijakan intervensi antara lain dapat berupa penetapan target pertumbuhan ekonomi yang optimistis dan tindakan politis (*political action*) yang kuat bagi Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur. Kebijakan intervensi Pemerintah Kota Pontianak dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan antarwilayah.

Pencapaian keseimbangan tersebut bukan berarti dengan cara menekan secara drastis tingkat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Barat, melainkan dengan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur menjadi jauh lebih besar dibandingkan rata-rata angka pertumbuhannya selama ini.

Sehubungan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka program pembangunan wilayah untuk lima tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Memperbaiki distribusi atau sebaran penduduk, dengan mengarahkan pertumbuhan penduduk dari wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi (seperti Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan) ke wilayah yang kepadatan penduduknya rendah (Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur) dengan cara pengembangan wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, baik dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi yang baru, penciptaan lapangan kerja, penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana wilayah, peningkatan keamanan, maupun kebijakan yang bersifat insentif-disinsentif.
2. Pengembangan wilayah berdasarkan sektor-sektor yang dinilai berpotensi di masing-masing kecamatan antara lain:
 - a. **Kecamatan Pontianak Utara** diarahkan untuk dikembangkan sektor industri dan sektor pertanian kota, agroindustri dan kegiatan pergudangan untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan. Selain itu juga diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata berbasis keunikan wilayah yang dilalui garis khatulistiwa (tugu Khatulistiwa) dan simpul-simpul *waterfront city*.
 - b. **Kecamatan Pontianak Timur** diarahkan untuk pengembangan kegiatan utama pada kegiatan wisata alam, budaya dan sejarah (Makam Kesultanan Pontianak, Keraton Kadariah, dan Masjid Jami Kadariah) dengan didukung pengembangan simpul-simpul *waterfront city* pada koridor sungai. Untuk mendukung perkembangan jumlah penduduk wilayah ini diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman terpadu dengan dukungan pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkotaan.
 - c. **Kecamatan Pontianak Tenggara dan Selatan** diarahkan untuk pengembangan kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi dan perdagangan serta kawasan-kawasan permukiman.
 - d. **Kecamatan Pontianak Barat** diarahkan untuk pengembangan kawasan perdagangan dan pergudangan untuk mendukung sektor jasa dan perdagangan.

- e. **Kecamatan Pontianak Kota** diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa untuk menciptakan pusat-pusat pelayanan kota dengan didukung pengembangan kawasan permukiman terpadu sebagai hinterlandnya.
3. Lebih menggalakkan penciptaan lapangan kerja yang bersifat informal, yang memungkinkan dimasuki oleh berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan tenaga kerja Kota Pontianak dengan cara:
 - a. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian secara langsung melalui program pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bagi aparat pemerintah daerah, pengusaha swasta, dan masyarakat luas.
 - b. Peningkatan wawasan dan informasi secara tak langsung melalui media cetak (surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, dan lain-lain), terutama mengenai hal-hal di bawah ini :
 - Informasi peluang usaha.
 - Kemampuan berkomunikasi (bahasa asing).
 - Pendidikan agama untuk memperkuat tata nilai dalam mengantisipasi budaya luar yang dibawa oleh wisatawan, investor, tenaga kerja, dan pedagang asing.
 - Pentingnya fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.
 - Berbagai ketrampilan khusus, seperti pembuatan cinderamata dan makanan khas Kota Pontianak.

Program Kewilayahan Eksternal

Program kewilayahan eksternal merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menjalin kerja sama dengan Kabupaten Pontianak serta Kubu Raya, yang secara geografi berbatasan langsung dengan Kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pontianak Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan (Desa Sungai Raya), Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil)
2. Kecamatan Pontianak Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil)
3. Kecamatan Pontianak Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya (Desa Kapur) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang)
4. Kecamatan Pontianak Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX) & (Desa Sungai Rengas)
5. Kecamatan Pontianak Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang) dan (Desa Mega Timur) & (Desa Jawa Tengah)
6. Kecamatan Pontianak Kota berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pall IX) & (Desa Punggur)

Sehubungan dengan kondisi-kondisi batas wilayah tersebut di atas, maka program pembangunan wilayah untuk lima tahun ke depan lebih di fokuskan dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan Kabupaten Kubu Raya dan Pontianak dalam mengatasi berbagai masalah infrastruktur, transportasi, ekonomi dan pelayanan publik dengan program pembangunan sebagai berikut:

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- Fasilitasi Penetapan dan penagasan batas wilayah

- Penentuan batas wilayah Kota dan Kabupaten Pontianak serta Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan *positioning analysis* dan kondisi riil dalam kerangka lingkungan strategis menjadi faktor peluang dan tantangan bagi Kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Peluang

- a. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya
- b. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (Asean Free Trade Area) dan CAFTA (China Asean Free Trade Area).
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
- d. Peran dan fungsi Kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional, dan internasional.
- e. Kebijakan Nasional yang mendukung pengembangan kota.

Tantangan

- a. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
- b. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan.
- c. Ketergantungan yang semakin besar kepada pemerintah pusat.
- d. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan wilayah.
- e. Sarana dan prasarana perkotaan yang belum dapat berkompetisi dalam lingkup regional dan internasional.

Secara garis besar tinjauan internal untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan.

Kebijakan ekonomi kota Pontianak tertera pada misi ketiga yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran. Misi ini ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan/kecamatan.
- b. Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, SDM pariwisata, kualitas produk dan pelayanan pariwisata.
- c. Penataan obyek daerah tujuan wisata (ODTW) yang berbasis tepian sungai.
- d. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik.
- e. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat padat karya di sektor sekunder dan tersier.
- f. Menyediakan tempat berusaha bagi pedagang informal.
- g. Memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk *home industry*.
- h. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, serta peternakan.
- i. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pangan.
- j. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan.
- k. Merevitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat.
- l. Memberikan kemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi.
- m. Membentuk kelompok usaha bagi siswa SMK sejak kelas 11.
- n. Memberikan insentif untuk investasi yang menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan sebesar 5,6%. Untuk itu, diperlukan investasi sebesar Rp. 4.896.90 milyar. Sedangkan tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,85% sehingga diperlukan investasi sebesar Rp. 5.260,18 milyar, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2010-2011

No	Indikator	2010*	2011**
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,85
2.	Pendapatan per Kapita Harga Berlaku (Rp.)	20.871.843,30	26.500.017,00
3.	Pendapatan per Kapita Harga Konstan (Rp.)	12.755.611,00	13.524.774,00
4.	Investasi Total (Rp. milyar)	4.896,90	5.260,18
	- Pemerintah (Rp. milyar)	1.469,07	1.578,05
	- Swasta (Rp. milyar)	3.427,83	3.682,13
5.	Inflasi (%)	5,71	7,27
6.	Angkatan Kerja (jiwa)	244.517	249.970
7.	Tingkat Pengangguran (%)	5,65	5,57
8.	Penduduk yang Bekerja (jiwa)	230.702	236.044
9.	Pengangguran Terbuka (jiwa)	13.815	13.926
10.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	3,92	4,00

Sumber: Analisis Tim Bappeda Kota Pontianak dan Fakultas Ekonomi Untan

* Perubahan setelah pembahasan KUA PPAS 2010

** Angka proyeksi

Pergerakan inflasi tahun 2010-2011 diperkirakan cukup stabil dikarenakan kondisi politik dan ekonomi cukup baik. Tahun 2010 tingkat inflasi di Kota Pontianak diperkirakan mencapai 5,71%, tahun 2011 diperkirakan naik menjadi 7,27%, sebagaimana terlihat pada tabel diatas. Kenaikan ini didorong oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan harga gas elpiji, dan resesi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan sangat memerlukan pembiayaan. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan dan meningkatkan penerimaan. Dengan demikian akibat dari peningkatan penerimaan, pemerintah daerah akan mengurangi ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah provinsi, dan pusat serta meningkatkan pembangunan.

3.4.1. Dana Desentralisasi

Dana desentralisasi merupakan dana berasal dari APBD Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desentralisasi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diteruskan kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2009

realisasi DAU Kota Pontianak sebesar Rp. 404.239.748.000,- atau 100% dan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Daerah sebesar 60,66%. Sedangkan proyeksi penerimaan DAU untuk tahun 2011 disamakan dengan penerimaan tahun 2010. Dana Alokasi Khusus merupakan bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat melalui lembaga kementerian secara langsung berkenaan dengan bidang urusan pembangunan daerah otonom sebanyak 9 (sembilan) bidang pembangunan meliputi : bidang Kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perikanan, air bersih, lingkungan, kependudukan, pertanian, dan kehutanan. Untuk tahun 2009 realisasi DAK Kota Pontianak sebesar Rp. 42.293.000.000,- atau 100%. Tahun 2010 Kota Pontianak menerima alokasi DAK sebesar Rp. 25.379.900.000,-. Sedangkan proyeksi penerimaan DAK tahun 2011 sebesar Rp. 41.861.850.000,-.

3.4.2. Dana Dekonsentrasi/APBN

Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yang dikoordinir langsung oleh Kementerian. Untuk tahun 2011 dana Dekonsentrasi diusulkan sebesar Rp. 84.428.903.000,- yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan bidang kesehatan dasar dan pekerjaan umum.

Tabel 3.10
Proyeksi Dana Dekonsentrasi/APBN Tahun 2011

No.	Bidang Urusan/Fungsi	Tahun 2011
1.	Kesehatan	Rp. 2.342.303.000,-
2.	Pekerjaan Umum	Rp. 82.086.600.000,-
Jumlah		Rp. 84.428.903.000,-

3.4.3. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan (Tupem) merupakan dana yang berasal dari penugasan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) dan desa atau sebutan lainnya dengan berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dan dananya bersumber dari APBN.

Dana Tugas Pembantuan diberikan dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan di bidang kesehatan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan serta keluarga berencana.

Tabel 3.11
Realisasi Tahun 2009 dan Proyeksi Tahun 2010 & 2011
Dana Tugas Pembantuan/APBN Kota Pontianak

No.	Bidang Pembangunan	Tahun		
		2009 (Rp. Juta)	2010 (Rp. Juta)	2011 (Rp. Juta)
1.	Kesehatan			
2.	Pekerjaan Umum			

No.	Bidang Pembangunan	Tahun		
		2009 (Rp. Juta)	2010 (Rp. Juta)	2011 (Rp. Juta)
3.	Ketenagakerjaan	623,9	1.569,1	3.080,0
4.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	1.500,0	325,0	
5.	Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil	15.000,0		
6.	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM			
	Jumlah	16.623,9	1.894,1	3.080,0

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.*

Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Meningkatkan anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Disiplin Anggaran.*

Belanja daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3. *Keadilan Anggaran.*

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan redistribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/Kota/Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Pengelolaan pendapatan Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Perkembangan pendapatan daerah Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan usaha dari pada pemerintah dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada secara optimal melalui dinas terkait. Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah yang ditempuh dan terus ditingkatkan didalam menunjang rasa kedekatan dan tanggung jawab antara masyarakat selaku objek pajak/retribusi dengan Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki.
4. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak.

Tabel 3.12
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2009-2011

POS	URAIAN	Tahun Anggaran				% kenaikan (2010-2011)
		2009	2010	bertambah/ (berkurang)	2011*	
4	PENDAPATAN DAERAH	701,265,336,076.77	730,378,855,450.00	(19,420,883,636.00)	710,957,971,814,00	-2,66%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	72,999,031,634.00	89,612,635,200.00	26,988,517,045.00	116,601,152,245.00	30,12%
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	41,738,000,000.00	49,624,200,000.00	36,445,340,000.00	86.069.540.000.00	73,44%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21,202,075,000.00	21,131,435,200.00	1.747.327.045,00	22.878.762.245,00	8,27%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,857,000,000.00	1,857,000,000.00	143.000.000,00	2.000.000.000,00	7,70%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8,201,956,634.00	17,000,000,000.00	(11.347.150.000,00)	5.652.850.000,00	-66,75%

POS	URAIAN	Tahun Anggaran				% kenaikan (2010-2011)
		2009	2010	bertambah/ (berkurang)	2011*	
4.2	Dana Perimbangan	530,928,535,379.26	508,380,639,093.00	(20,940,081,093.00)	487,440,558,000.00	-4,12%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84,395,787,379.26	74,820,335,093.00	(24,949,677,093.00)	49,870,658,000.00	-33,35%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	404,239,748,000.00	408,180,404,000.00	4.009.596.000,00	412,190,000,000.00	0,98%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	42,293,000,000.00	25,379,900,000.00	0,00	25.379.900.000,00	0,00%
4.3	Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah	97,337,769,063.51	132,385,581,157.00	(25,469,319,588.00)	106,916,261,569.00	-19,24%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	35,000,000,000.00	(482,041,000.00)	34,517,959,000.00	-1,38%
4.3.2	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57,555,484,063.51	57,385,581,157.00	4,462,721,412.00	61,848,302,569.00	7,78%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25,282,285,000.00	10,000,000,000.00	(10.000.000.000,00)	0,00	-100,00%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14,500,000,000.00	30,000,000,000.00	(19,450,000,000.00)	10,550,000,000.00	-64,83%
5	BELANJA DAERAH	720,378,810,826.87	764.417.755.747,04	(32.069.783.933,04)	732.347.971.814,00	-4,20%
5.1	Belanja Tidak Langsung	340,535,975,010.87	389.237.400.011,08	41.588.485.088,92	430.825.885.100,00	10,68%
5.1.1	Belanja Pegawai	319,379,279,100.00	367.653.590.400,00	42.516.294.700,00	410.169.885.100,00	11,56%
5.1.2	Belanja Bunga	600,000,000.00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00%
5.1.3	Belanja Subsidi	450,000,000.00	400.000.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00	12,50%
5.1.4	Belanja Hibah	10,887,500,000.00	8.075.000.000,00	0,00	8.075.000.000,00	0,00%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,392,000,000.00	10.977.204.000,00	(977.204.000,00)	10.000.000.000,00	-8,90%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kota dan Pemerintahan Desa		0,00	0,00	0,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	827,195,910.87	1.531.605.611,08	(605.611,08)	1.531.000.000,00	-0,04%
5.2	Belanja Langsung	379,842,835,816.00	375.180.355.735,96	(73.658.269.021,96)	301.522.086.714,00	-19,63%
5.2.1	Belanja Pegawai	47,781,846,500.00	58.155.468.750,00	(21.059.886.063,00)	37.095.582.687,00	-36,21%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133,848,907,800.00	125.370.922.674,00	(15,281,682,837.00)	110,089,239,837.75	-12,19%
5.2.3	Belanja Modal	198,212,081,516.00	191.653.964.311,96	(37,316,700,121.96)	154,337,264,190.00	-19,47%
	Surplus/(Defisit)		(34.038.900.297,04)	12.648.900.297,04	(21.390.000.000,00)	-37.16%
6	PEMBIAYAAN DAERAH		40.269.560.979,04	(18.879.560.979,04)	21.390.000.000,00	-46.88%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20,723,474,750.00	37.154.230.638,04	(14.154.230.638,04)	23.000.000.000,00	-38,10%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA	16,923,474,750.00	33.354.230.638,04	(11.354.230.638,04)	22.000.000.000,00	-34,04%

POS	URAIAN	Tahun Anggaran				% kenaikan (2010-2011)
		2009	2010	bertambah/ (berkurang)	2011*	
	sebelumnya					
6.1.2	Pencairan dana Cadangan	4,000,000,000.00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3,800,000,000.00	3.800.000.000,00	(2.800.000.000,00)	1.000.000.000,00	-73,68%
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		3.115.330.341,00	(1.505.330.341,00)	1.610.000.000,00	-48,32%
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2.505.330.341,00	(1.505.330.341,00)	1.000.000.000,00	-60,09%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang		610.000.000,00	0,00	610.000.000,00	0,00%
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan					
6.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan					
	Pembiayaan Netto		34.038.900.297,04	(12.648.900.297,04)	21.390.000.000,00	-37,16%

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,66% atau dari Rp. 730.378.855.450,00 menjadi Rp. 710.957.971.814,00. Proyeksi ini merupakan hasil dari perbandingan target pendapatan daerah tahun 2010 sebagai tahun berjalan sedangkan pendapatan daerah tahun 2011 yang merupakan proyeksi tahun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2011.

Bagian PAD pada tahun 2009 sebesar Rp. 72.999.031.634,- jika di bandingkan dengan tahun 2010 di proyeksikan meningkat sebesar Rp. 89.612.635.200,- dengan penambahan sebesar Rp. 16.613.603.566,- atau 10,22% sedangkan untuk tahun 2011 di proyeksikan menjadi sebesar Rp. 116.601.152.245,00. Perkembangan peningkatan PAD ini tidak terlepas dari kontribusi pajak dan retribusi daerah yang secara dominan mempengaruhi besar atau kecilnya PAD.

Bagian dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2010 bagian dana perimbangan ini di proyeksikan sebesar Rp. 508.380.639.093,- untuk tahun 2011 dana perimbangan ini diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp. 487.440.558.000,00 atau -4,12%.

Peranan pos DAU cukup besar dalam menyumbang besaran pendapatan daerah tahun 2010 yang diproyeksikan sebesar Rp. 408.180.404.000,- dan proyeksi tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 412.190.000.000,00 atau 0,98%. Sedangkan untuk DAK pada tahun 2010 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 25.379.900.000,- dari tahun 2009 sedangkan proyeksi untuk DAK pada tahun 2011 sama dengan tahun 2010.

3.5.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Secara garis besar belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, sosial maupun sarana infrastruktur yang layak bagi masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Pontianak difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah.

Proyeksi anggaran belanja langsung untuk tahun 2011 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Belanja Langsung Per Urusan
Tahun Anggaran 2009-2011

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Belanja Langsung Setelah Perubahan 2009	Belanja Langsung Sebelum Perubahan 2010	Belanja Langsung Proyeksi 2011*
1	2	3	4	5
A	Urusan Wajib			
I	Bidang Pendidikan	63.954.866.222	70.242.400.000	56.397.381.571,21
1	Dinas Pendidikan Kota Pontianak	63.954.866.222	70.242.400.000,00	56.397.381.571,21
II	Bidang Kesehatan	19.332.352.594	18.214.867.450	14.624.654.479,98
1	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	19.332.352.594	18.214.867.449,96	14.624.654.479,98
III	Bidang Pekerjaan Umum	121.520.469.750	137.138.345.000	110.107.905.923,06
1	Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak	121.520.469.750	137.138.345.000	110.107.905.923,06
IV	Bidang Penataan Ruang	1.724.109.100	1.705.100.000	1.369.018.930,40
1	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak	1.724.109.100	1.705.100.000	1.369.018.930,40
V	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.905.918.048	3.412.200.000	2.739.643.653,94
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	3.905.918.048	3.412.200.000	2.739.643.653,94

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Belanja Langsung Setelah Perubahan 2009	Belanja Langsung Sebelum Perubahan 2010	Belanja Langsung Proyeksi 2011*
VI	Bidang Perhubungan	5.398.031.900	4.887.592.436	3.924.231.170,60
	1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	5.398.031.900	4.887.592.436	3.924.231.170,60
VII	Bidang Lingkungan Hidup	19.742.295.943	19.399.000.000	15.575.390.435,12
	1 Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak	2.821.766.517	2.184.600.000	1.754.007.832,60
	2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak	16.920.529.426	17.214.400.000	13.821.382.602,52
VIII	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	2.774.722.874	2.514.400.000	2.018.803.119,24
	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak	2.774.722.874	2.514.400.000	2.018.803.119,24
IX	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3.113.906.618	3.113.906.618	2.500.144.922,62
	1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pontianak	3.113.906.618	2.748.800.000	2.207.002.073,72
X	Bidang Sosial	2.730.236.300	2.730.236.300	2.192.097.342,78
	1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak	2.730.236.300	2.712.000.000	2.177.455.480,18
XI	Bidang Koperasi dan UKM	2.002.048.357	2.094.580.000	1.681.731.083,95
	1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kota Pontianak	2.002.048.357	2.094.580.000	1.681.731.083,95
XII	Bidang Penanaman Modal	1.125.462.500	1.117.220.000	897.012.098,66
	1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak	1.125.462.500	1.117.220.000	897.012.098,66
XIII	Bidang Kebudayaan	2.896.020.569	2.013.200.000	1.616.391.361,62
	1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak	2.896.020.569	2.013.200.000	1.616.391.361,62
XIV	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.206.192.000	3.943.080.000	3.165.885.381,56
	1 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak	3.206.192.000	3.943.080.000	3.165.885.381,56
XV	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.369.823.200	6.945.690.000	5.576.670.632,06
	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak	-	1.318.330.000	1.058.482.626,54
	2 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pontianak	1.999.292.700	1.112.000.000	892.820.978,60
	3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	5.370.530.500	4.515.360.000	3.625.367.026,92
XVI	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	91.515.728.662	86.765.860.850	69.664.011.504,62
	1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			0,00
	2 Kepala Daerah & Wakil Kepala daerah			0,00
	3 Sekretariat Daerah Kota Pontianak	44.219.882.975	44.914.800.000	36.061.938.569,79
	4 Sekretariat DPRD Kota Pontianak	16.537.174.050	16.619.046.400	13.343.375.243,02
	5 Sekretariat KORPRI Kota Pontianak		300.000.000	240.868.969,05
	6 Inspektorat Kota Pontianak	2.054.843.400	2.108.400.000	1.692.827.114,46
	7 Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak	7.028.933.600	6.800.000.000	5.459.696.631,72
	8 Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak	3.849.052.675	3.833.780.000	3.078.128.787,17
	9 Kecamatan Pontianak Barat	2.750.754.300	2.027.600.000	1.627.953.072,13
	10 Kecamatan Pontianak Selatan	2.616.820.474	1.831.080.000	1.470.167.839,47
	11 Kecamatan Pontianak Timur	2.124.701.001	1.735.902.000	1.393.749.750,35
	12 Kecamatan Pontianak Utara	3.106.831.334	2.128.200.000	1.708.724.466,42
	13 Kecamatan Pontianak Kota	2.935.447.797	1.822.292.450	1.463.112.345,78
	14 Kecamatan Pontianak Tenggara	2.657.567.056	1.633.960.000	1.311.900.868,88
	15 Pelaksanaan Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV-AIDS Kota Pontianak	1.633.720.000	1.010.800.000	811.567.846,37

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Belanja Langsung Setelah Perubahan 2009	Belanja Langsung Sebelum Perubahan 2010	Belanja Langsung Proyeksi 2011*
XVII	Bidang Ketahanan Pangan	1.161.223.100	1.163.200.000	933.929.282,65
	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1.161.223.100	1.163.200.000	933.929.282,65
	1 Kota Pontianak			
XVIII	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.487.665.810	1.612.600.000	1.294.750.998,28
	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota	1.487.665.810	1.612.600.000	1.294.750.998,28
	1 Pontianak			
XIX	Bidang Kearsipan	1.219.545.600	1.210.800.000	972.147.159,07
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.219.545.600	1.210.800.000	972.147.159,07
	1 Kota Pontianak			
B	Urusan Pilihan			
I	Bidang Pertanian	8.640.945.900	5.318.600.000	4.270.285.662,57
	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	8.640.945.900	5.318.600.000	4.270.285.662,57
	1 Kota Pontianak			
	Total	364.821.565.047	375.542.878.654	301.522.086.714

Ket

*Proyeksi

Belanja langsung yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2009 sebesar Rp. 364.821.565.047,- (realisasi), tahun 2010 sebesar Rp. 375.180.355.735,96 (target), tahun 2011 sebesar Rp. 301.522.086.714,00 (proyeksi).

3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan (Penerimaan) dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk pembiayaan penerimaan yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pada tahun 2009 pembiayaan yang menjadi penerimaan di targetkan sebesar Rp. 20.723.474.750,10 jika dibandingkan dengan tahun 2010 penerimaan pembiayaan diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 37.154.230.638,04,- dengan peningkatan sebesar Rp. 16.430.755.877,94,- atau 28,39%. Sedangkan tahun 2011 pembiayaan diperkirakan menurun menjadi Rp.23.000.000.000,00 atau -38,10%.

Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (*investasi penerimaan daerah*), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2011

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan Visi Kota Pontianak “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik” telah disusun langkah-langkah strategis melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya, dan harmonis
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa
6. Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Ketaatan Hukum dan Perundang-Undangan yang Berlaku

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk melaksanakannya diperlukan arah kebijakan pembangunan secara konkrit guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Adapun arah kebijakan pembangunan pada masing-masing misi yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

- A. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis** adalah sebagai berikut:
 1. Upaya pemberian pembiayaan kesehatan pada masyarakat miskin dalam bentuk asuransi kesehatan.
 2. Penyediaan 6 Puskesmas rawat inap dan pelayanan dokter spesialis
 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
 4. Mengoptimalkan posyandu untuk menekan angka kematian ibu dan anak
 5. Penyediaan rumah sakit tipe C di Kota Pontianak
 6. Mengoptimalkan posyandu untuk menekan angka kematian ibu dan anak.
 7. Memperbanyak dokter spesialis di puskesmas
 8. Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan dan reproduksi remaja
 9. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
 10. Peningkatan/perluasan layanan kesehatan terkait Narkoba, HIV dan AIDS
 11. Memberikan pendidikan gratis bagi keluarga miskin

12. Memberikan kesempatan pada anak terlantar dan jalan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan
13. Mengoptimalkan dan membentuk balai pelatihan teknologi padat karya di setiap kelurahan bekerjasama dengan LPM
14. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang lebih dekat kemasyarakat
15. Membangun sarana dan prasarana untuk SD, SMP, SMA dan SMK
16. Mewujudkan sekolah berstandar nasional dan internasional untuk SMP, SMA dan SMK
17. Mengembangkan pendidikan berbasis lapangan kerja
18. Meningkatkan budaya toleransi di masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan

B. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dengan **Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda** adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pelatihan dan modal bergulir untuk industri rumah tangga
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut andil dalam kancah politik
3. Memberikan perhatian kepada organisasi yang membela permasalahan yang dihadapi kaum perempuan
4. Menekan angka KDRT dan menyediakan pusat konsultasi keluarga
5. Meningkatkan persentase pegawai perempuan dalam jabatan struktural
6. Memberikan pelatihan dan kemudahan akses permodalan kepada organisasi kepemudaan
7. Memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi
8. Menjadikan kelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam menangani masalah di Kota Pontianak

C. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam upaya **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran** adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan/kecamatan
2. Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, SDM pariwisata, kualitas produk dan pelayanan pariwisata
3. Penataan ODTW yang berbasis tepian sungai
4. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik
5. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat pada karya disektor skunder dan tersier
6. Menyediakan tempat berusaha bagi pedegang informal
7. Memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk home industri
8. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan serta peternakan
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pangan.
10. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
11. Merevitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat
12. Memberikan kemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi

13. Membentuk kelompok-kelompok usaha bagi siswa SMK sejak kelas II
 14. Memberikan insentif untuk investasi yang menyerap tenaga kerja
- D. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam upaya **Meningkatkan Keamanan dan ketertiban Untuk Mendukung Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif** adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis kemasyarakatan.
 2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan
 3. Menjalin kemitraan antara masyarakat dan aparat keamanan (POLMAS).
 4. Mengaktifkan koordinasi antar pemerintah daerah dan aparat keamanan
 5. Meningkatkan budaya toleransi antar suku dan agama
- E. Arah kebijakan pembangunan di tempuh dalam **Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Untuk Menunjang Perkembangan Perdagangan dan Jasa** adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pertumbuhan kota
 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasi genangan air
 3. Mengurangi permukiman kumh melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat
 4. Perbaiki 500 s/d 1.000 unit rumah kumuh setiap tahun melalui bantuan bahan bangunan untuk keluarga miskin
 5. Pembangunan jalan lingkungan melalui keswadayaan masyarakat
 6. Meningkatkan kemampuan penanganan sampah di TPA dengan manajemen persampahan yang baik dan melanjutkan program CDM
 7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
 8. Meningkatkan penataan penghijauan dan pemerliiharaan taman kota
 9. Penataan angkutan umum perkotaan yang layak dalam pelayanan
 10. Mempercepatnya terwujudnya jalan lingkar luar
 11. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga guna peningkatan prestasi atlet
 12. Perluasan pelayanan air bersih
- F. Arah kebijakan pembangunan di tempuh dalam **Mewujudkan Tata Ruang, Tata Kota dan Wilayah yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan** dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas fisik lingkungan hidup yang lebih seimbang, tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan
 2. Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang berwawasan lingkungan
 3. Meningkatkan pengawasan dalam penerapan aturan pendirian bangunan
 4. Mengurangi penggunaan material kayu dalam pembangunan
 5. Mempercepat pemanfaatan kawasan perdagangan

- G. Arah kebijakan pembangunan di tempuh dalam **Meningkatkan prinsip-prinsip good governance, ketaatan hukum masyarakat dan Perundang-undangan yang Berlaku** adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 2. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas komunikasi.
 3. Meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat.
 4. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan dan laporan kepada SKPD.
 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum terutama peraturan daerah.
 6. Memproiritaskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan berdasarkan aspirasi masyarakat.
 7. Meningkatkan sumber daya aparatur (SDM), meningkatkan disiplin aparatur, meningkatkan kinerja pns menerapkan pembinaan PNS melalui sistem karir dan prestasi kerja.
 8. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi.
 9. Menerapkan sistem dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset serta mensertifikasi aset pemerintah daerah.
 10. Meningkatkan peran lembaga kecamatan dalam permasalahan pembangunan pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2011

4.2.1. Tujuan

Berdasarkan perkembangan kondisi, agenda prioritas pembangunan lima tahunan serta potensi yang dimiliki saat ini, maka tujuan pembangunan yang ingin capai pada tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

- A. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama, yaitu **"Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis"** melalui:
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
 3. Peningkatan keharmonisan masyarakat dan toleransi beragama
- B. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua, yaitu **"Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda"** melalui:
1. Peningkatan pemberdayaan perempuan
 2. Peningkatan pemberdayaan pemuda
- C. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga, yaitu **"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran"** melalui :
1. Peningkatan pertumbuhan yang lebih merata antar kawasan
 2. Pengurangan pengangguran

- D. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat, yaitu **"Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif"** melalui:
1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparaturnya keamanan
- E. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima, yaitu **"Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa"** melalui:
1. Peningkatan Sarana dan prasarana dasar perkotaan
 2. Peningkatan sarana penunjang pengembangan perdagangan dan jasa
- F. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keenam, yaitu **"Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan"** melalui:
1. Mewujudkan penataan ruang & kota yang berwawasan lingkungan
- G. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketujuh, yaitu **"Meningkatkan prinsip-prinsip good governance, ketaatan hukum masyarakat dan Perundang-undangan yang Berlaku"** melalui :
1. Meningkatkan keterbukaan, dan transparansi informasi
 2. Meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan pembangunan
 3. Meningkatkan Supremasi Hukum
 4. Meningkatkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 5. Meningkatkan daya tanggap aparaturnya pemerintah
 6. Meningkatkan desentralisasi kewenangan yang lebih baik

4.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai di tahun anggaran 2011 ini sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan swasta, sehingga diperlukan gerak langkah bersama untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin di capai dalam satu tahun anggaran. Adapun sasaran pembangunan untuk tahun anggaran 2011 berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
 2. Berkurangnya jumlah keluarga miskin yang tidak dapat menyekolahkan anaknya,
 3. Terselenggaranya fasilitasi pembinaan anak-anak yang terjerang razia masalah sosial (anak terlantar), gelandangan dan pengemis
 4. Meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengembangkan budaya membaca
 5. Terciptanya kerapian, kecepatan dan kecukupan dalam penataan arsip
 6. Meningkatnya budaya toleransi beragama dan keharmonisan masyarakat

- B. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemuda adalah:
1. Tersedianya permodalan dan pelatihan bagi industri rumah tangga,
 2. Berkurangnya angka KDRT
 3. Tersedianya pusat konsultasi keluarga
 4. Tersedianya permodalan dan pelatihan bagi organisasi kepemudaan,
 5. Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi serta
 6. Aktifnya kelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam menangani masalah Kota Pontianak
- C. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan penanggulangan pengangguran adalah:
1. Mengecilnya ketimpangan pertumbuhan antar kawasan/kecamatan,
 2. Berkembangnya pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya
 3. Meningkatnya kelompok-kelompok usaha yang terbentuk bagi siswa SMK sejak kelas 11
- D. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung iklim investasi yang kondusif adalah:
1. Terjalannya kerjasama antara pemerintah dan aparaturnya keamanan dalam menciptakan rasa aman di masyarakat
- E. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa adalah:
1. Menurunnya ruas jalan yang mengalami kemacetan,
 2. Meningkatnya kualitas dan lebar jembatan,
 3. Meningkatnya ruas jalan yang bebas genangan,
 4. Menurunnya luas wilayah genangan air,
 5. Meningkatnya saluran drainase dengan konstruksi yang memadai,
 6. Menurunnya rumah tidak layak huni masyarakat perkotaan,
 7. Berkurangnya tumpukan sampah di jalan kota
 8. Meningkatnya ruang terbuka hijau dan taman kota
 9. Meningkatnya aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas
 10. Meningkatnya pelayanan air bersih
- F. Sasaran yang ingin dicapai dalam pewujudan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan adalah:
1. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan pencemaran air dan udara,
 2. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan pencemaran air dan udara,
 3. Tersedianya perencanaan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh,
 4. Meningkatnya pengendalian penataan ruang
- G. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan ketaatan hukum masyarakat adalah:
1. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat
 2. Meningkatnya akuntabilitas SKPD dalam pengelolaan keuangan

3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
4. Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur
6. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani perijinan
8. Meningkatkan koordinasi pembangunan kecamatan dengan masyarakat

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2011

Prioritas pembangunan di Kota Pontianak tahun anggaran 2011 diutamakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan swasta, maka prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2011 diarahkan untuk melaksanakan program-program yang dapat memberikan dampak secara luas dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Adapun program prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2011 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi lima tahun kedepan mengingat tahun anggaran 2011 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM kota Pontianak 2010-2014. Untuk itu prioritas program disusun menurut 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan sebagai mana dijabarkan berikut ini:

- A. Prioritas program pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis adalah:
 1. Program upaya kesehatan masyarakat
 2. Program Keluarga Berencana
 3. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 4. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun
 5. Program pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
 6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 7. Program pembinaan anak terlantar

- B. Prioritas program pembangunan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemuda adalah:
 1. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
 2. Program peningkatan peduli perempuan dan anak
 3. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 4. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 5. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
 6. Program pengembangan sarana dan prasarana olah raga

- C. Prioritas program pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan penanggulangan pengangguran adalah:
 1. Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
 2. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi
 3. Program Pengembangan destinasi pariwisata
 4. Program pengembangan industri kecil dan menengah

- D. Prioritas program pembangunan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung iklim investasi yang kondusif adalah:
1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- E. Prioritas program pembangunan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa adalah:
1. Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA
 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 4. Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
 5. Program Pembangunan turap/talud dan bronjong
 6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lain
 7. Program pengendalian banjir
 8. Program pengembangan pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber air lainnya
 9. Program penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman
 10. Program pemberdayaan komunitas perumahan
 11. Program pengembangan perumahan
 12. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 13. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 14. Program penataan dan pemeliharaan taman/ ruang terbuka hijau (RTH)
 15. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
 16. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 17. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
 18. Program penataan dan pengelolaan aset daerah
 19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
 20. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 21. Program pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya
 22. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- F. Prioritas program pembangunan dalam rangka pewujudan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan adalah:
1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 2. Program peningkatan pengendalian polusi
 3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 4. Program perencanaan tata ruang
 5. Program pemanfaatan ruang
 6. Program penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung
 7. Program pengendalian pemanfaatan ruang
- G. Prioritas program pembangunan dalam rangka peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan ketaatan hukum masyarakat adalah:
1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan

2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3. Program perencanaan pembangunan daerah
4. Program pendidikan kedinasan
5. Program Pelayanan prima
6. Program penataan administrasi kependudukan
7. Program pembangunan kecamatan dan kelurahan

4.3.1. Target-Target Pembangunan

RKPD merupakan penjabaran RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sehingga muatan-muatan yang terkandung didalamnya juga memuat target-target pencapaian dalam satu tahun anggaran yang merupakan rangkaian proses untuk mencapai target visi dan misi pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Berikut ini program-program prioritas beserta target indikator di tahun 2011 yang juga merupakan tahun kedua implementasi RPJM 2010-2014.

Tabel 4.1
Program Prioritas dan Target Indikator Tahun 2011

NO	MISI	Program Prioritas	Target Indikator Keberhasilan	Angka
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis	1 Program Upaya kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71.24
			Angka Kematian Bayi	3.32%
			Angka Kematian Balita (kasus)	0
			Gizi Buruk (kasus)	0
			Kejadian Luar Biasa (DBD) (angka kesakitan Per 100.000. penduduk)	20.46%
		2 Program Keluarga Berencana	Peserta KB baru / PUS	12%
			Peserta KB Aktif / PUS	65%
		3 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba. PMS termasuk HIV/AIDS	ODHA & Kelompok Risiko di Kota Pontianak dapat (%) mengakses Layanan Kesehatan	50-40
		4 Program wajib belajar 12 tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.00
			- Angka Melek Huruf (%)	96.93
			- Lama sekolah (tahun)	10.02
			APM SD, SLTP dan SLTA (%)	100 - 70
			APK SD, SLTP dan SLTA (%)	97.89/140.56/105.36
			Angka Putus Sekolah SD, SLTP dan SLTA	0.0-0.58
			Kelayakan Mengajar Guru SD	37-37
			Kelayakan Gedung SD	97.19
			NEM rata-rata SD, SLTP dan SLTA	7.2-6.36
		5 Program pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)	21.48
		6 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatkan kunjungan masyarakat di perpustakaan / rumah baca sebesar	11%/Thn
		7 Program pendidikan politik masyarakat	Penanganan anak terlantar	100%
			Peningkatan keterampilan anak terlantar	100%

NO	MISI	Program Prioritas	Target Indikator Keberhasilan	Angka	
2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda	1	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Usaha kecil rumah tangga berbasis gender memperoleh modal dan pelatihan teknologi industri (%)	95
		2	Program peningkatan peduli perempuan dan anak	Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (%)	100
		3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Tingkat kualitas pemuda (15-35 tahun) %	30
		4	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Penanganan kasus KDRT dan menyediakan 2 pusat konsultasi keluarga (%)	95
		5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemerintah menyediakan modal dan mengadakan kegiatan pelatihan bagi organisasi kepemudaan (%)	55
		6	Program pembinaan dan masyarakatan olah raga	Tingkat prestasi olah raga Kota Pontianak (%)	55
		7	Program pengembangan sarana dan prasarana olah raga	Tingkat ketersediaan sarana prasaran olah raga (%)	80%
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Merata dan Mampu Memberikan Dampak Mengurangi Pengangguran	1	Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Angka Kemiskinan (%)	5.77
				Angka Pengangguran Terbuka (%)	6,90
				Angka Kesempatan Kerja (%)	90.78
				Pertumbuhan Ekonomi (%)	
				Inflasi (%)	
				PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta)	
				PDRB Berlaku 2000 (Rp. Juta)	
				PDRB per kapita konstan (Rp.)	
				PDRB per kapita berlaku (Rp.)	
				- Pengeluaran Riil per kapita (Rp000/bln)	
		2	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Tingkat implemtasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah (%)	77
		3	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Lama tinggalnya wisatawan dalam dan luar negeri (hari).	3-5 hari
				Peningkatan jumlah kunjungan wisata (%)	45
4	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM dan Koperasi yang memiliki kemampuan teknologi industri (%)	55		
		Jumlah nilai produksi industri rumah tangga. kecil. menengah meningkat (%)	27		

NO	MISI	Program Prioritas	Target Indikator Keberhasilan	Angka
4	Meningkatkan Keamanan & Ketertiban untuk Mendukung Terciptanya Iklim Investasi yg Kondusif	1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas menurun sebesar (%)	80
			Rasio jumlah siskamling yang aktif terhadap jumlah RT adalah 1:1	2%
5	Meningkatkan Sarana & Prasarana Dasar Perkotaan Untuk Menunjang Perkembangan Perdagangan dan Jasa	1 Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA	Tingkat penanganan perencanaan wilayah strategis.dan cepat tumbuh	10 dok/tahun
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Kondisi Jalan Kota Mantap/Baik	66.38%
		2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan baru (Km)	5
		3 Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas pada (gang)	1.000
		4 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Sistem jaringan drainase kota terintegrasi	75.00%
		5 Program Pembangunan turap/talud dan bronjong	Luas genangan air tertangani	80.00%
		6 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lain	Pemeliharaan Saluran Primer dan sekunder (lokasi)	90
		7 Program pengendalian banjir	menurunnya lama genangan air maksimal (jam)	5,5
		8 Program pengembangan pengelolaan dan konversi sungai. danau dan sumber air lainnya	Peningkatan saluran primer dan sekunder (lokasi)	55
		9 Program penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman	Perbaikan rumah tidak layak huni masyarakat (rumah)	2.500
		10 Program pemberdayaan komunitas perumahan	Tingkat penataan sebaran kawasan kumuh (%)	42,5
11 Program Pengembangan Perumahan	Tingkat sebaran perumahan (%)	50		

NO	MISI	Program Prioritas	Target Indikator Keberhasilan	Angka
		12 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tingkat Pelayanan Air Bersih (penduduk)	80.50%
		13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pelayanan Kebersihan (Sampah Terangkut)	83.20%
		14 Program penataan dan pemeliharaan taman/RTH	Ruang terbuka hijau (RTH) dari luas Kota	30.00%
		15 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Tingkat pelayanan sarana dan prasaran perhubungan (%)	77,5
		16 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat pengendalian dan pengamanan lalulintas jalan (%)	95
		17 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Tingkat kecelakaan lalu lintas (%)	9
		18 Program penataan dan pengelolaan aset daerah	Jumlah aset daerah yang telah terinventarisasi (%)	100
		29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Tingkat ketersediaan sarana prasaran olah raga (%)	75%
		20 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Jumlah Sambungan PDAM (titik)	80.722
		21 Program pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya	Menurunnya lama genangan air maksimal (jam)	5,5
		22 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Sumber daya aparatur bidang LH memenuhi kompetensi standar	75

NO	MISI	Program Prioritas	Target Indikator Keberhasilan	Angka
6	Mewujudkan Tata Ruang, Tata Kota dan Wilayah yang Seimbang serta Berwawasan Lingkungan	1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Sumber daya aparatur bidang LH memenuhi kompetensi standar (%)	80
		2 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) %	Memenuhi ambang batas
		3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tingkat pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW	85
		4 Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen-dokumen rencana tata ruang tersedia	80.00%
		5 Program Pemanfaatan Ruang	Pembangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang	85.00%
		6 Program penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung	Jumlah Rumah Kumuh tertangani	12.50%
		7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	kasus pelanggaran pendirian bangunan tertangani	75%
7	Meningkatkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Ketaatan Hukum dan Perundang-Undangan yang Berlaku	1 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pemb	Akses masyarakat kepada informasi publik (%)	80
		2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	SKPD menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (%)	100
		3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan dan validasi perencanaan pembangunan daerah (%)	95
		4 Program Pendidikan Kedinasan	PNS yang menempati formasi jabatan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman & kompetensi (%)	77
		5 Pelayanan prima	Pelayanan Perijinan (% pelayanan sesuai SPM)	80.00%
		6 Program penataan administrasi kependudukan	Tingkat Akurasi data kependudukan	95%
		7 Program pembangunan kecamatan dan kelurahan	Pembangunan prasarana kecamatan dan kelurahan (PPK) meningkat (gang/pertahun)	200

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2011 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014 yang memuat Kerangka Kerja Tahunan dari Pemerintah Kota Pontianak beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. RKPD Kota Pontianak Tahun 2011 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Pontianak Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Sebagai implementasi pelaksanaan RKPD, maka SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Pontianak.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2011 kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2011.
6. Setiap akhir tahun Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD serta kesesuaiannya

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.

7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Pontianak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta secara aktif dalam perancangan dan perumusan kebijakan, dalam pembangunan melalui program-program pembangunan dan dalam pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan manajerial operasional, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2011. Substansinya memuat program dan kegiatan APBD yang akan dilaksanakan sebagai sarana untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya diperlukan kesatuan langkah seluruh komponen yang terlibat.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi kepentingan-kepentingan masyarakat, dunia usaha, Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberadaannya dapat dijadikan rujukan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, karena keberhasilan pelaksanaan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, itikad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh komponen pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak.

Untuk itu, seluruh SKPD sebagai pelaksana program/kegiatan APBD, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

 WALIKOTA PONTIANAK *ts*


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan manajerial operasional, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2011. Substansinya memuat program dan kegiatan APBD yang akan dilaksanakan sebagai sarana untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya diperlukan kesatuan langkah seluruh komponen yang terlibat.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi kepentingan-kepentingan masyarakat, dunia usaha, Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberadaannya dapat dijadikan rujukan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, karena keberhasilan pelaksanaan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, itikad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh komponen pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak.

Untuk itu, seluruh SKPD sebagai pelaksana program/kegiatan APBD, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum